

JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4210.29/Sosiologi Perilaku Menyimpang 29**
Tugas : **2**

Pertanyaan 1/2:

Kota HARMONI

1.a. Identifikasi dan analisis faktor-faktor utama yang mungkin menjadi penyebab terjadinya parameter masyarakat yang patologis di kota Harmoni

1.b. Jelaskan secara rinci, bagaimana pendekatan pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah parameter masyarakat yang patologis di Kota Harmoni?

1.c. Berikan saran atau rekomendasi kongkrit untuk memperbaiki kondisi parameter masyarakat yang patologis di kota Harmoni dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan pendekatan yang dapat diambil?

Jawaban 1/2:

1.a. Masyarakat yang patologis (*pathological society*) dibahas dalam (Ref. [1], Modul **04**, *Kegiatan Belajar 2*, hal. 4.28 – 4.42), didefinisikan sebagai masyarakat yang terjangkiti berbagai penyakit sosial (*social pathology*) berupa masalah-masalah yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum, seperti berbagai tindak kejahatan dan penyalah-gunaan obat-obatan terlarang yang ditengarai terjadi di Kota Harmoni. Di samping itu, ditengarai kemiskinan di kota tersebut pun meningkat tajam. Dalam sosiologi, masyarakat yang patologis – di-analogi-kan seperti tubuh manusia yang sakit secara medis – adalah masyarakat yang strukturnya, atau kelembagaan sosial-nya, atau pola interaksi antar warga masyarakatnya, tidak sehat, tidak normal, atau tidak berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti yang ditengarai terjadi di Kota Harmoni. Sebagaimana seorang dokter sangat berhati-hati dalam membuat diagnosa, sosiologi juga sangat berhati-hati dalam menentukan apakah masyarakat itu “sehat” atau “patologis”, karena kedua istilah tersebut seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang ada. Jika terkait dengan kesehatan tubuh manusia, dokter yang menguasai ilmu kedokteran memiliki otoritas untuk menentukan sehat atau sakitnya pasien, maka siapakah yang punya otoritas menentukan bahwa masyarakat Kota Harmoni sedang “sakit”? Sosiologi mungkin lebih menekankan pada upaya untuk mencari akar masalah, dan mencari solusi, daripada sekedar menyatakan bahwa masyarakat Kota Harmoni sedang dalam kondisi “sakit”. Penyebab suatu masyarakat menjadi patologis umumnya multi-dimensional, merupakan perpaduan antara masalah-masalah struktural, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Seperti salah satu gejala yang diamati di Kota Harmoni, yaitu meningkatnya kemiskinan.

Kemungkinan besar penyebabnya adalah masalah struktural. Terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara sebagian warga yang semakin kaya, sementara sebagian yang lain semakin miskin, karena tidak meratanya kesempatan untuk mencari nafkah di antara warga masyarakat. Tentu saja kesenjangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang ujung-ujungnya akan memicu tindak kejahatan (misalnya pencurian), atau membuat rasa frustrasi yang mendorong penyalah-gunaan obat-obat terlarang. Penyalah-gunaan obat-obatan terlarang bisa jadi juga dilakukan oleh orang-orang kaya, karena biasanya obat-obatan seperti itu harganya mahal, hanya yang kelebihan uang yang mampu membelinya. Mengutip (Ref. [2], Durkheim (1951)) yang mengkaji kasus-kasus bunuh diri, faktor-faktor penyebab masyarakat Kota Harmoni menjadi patologis adalah perubahan sosial yang terlalu cepat, misalnya pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat karena urbanisasi, krisis ekonomi, atau pengaruh budaya, atau penggunaan teknologi baru dalam berkomunikasi, sehingga melunturkan norma-norma yang berlaku, atau dekadensi moral, karena lemahnya nilai-nilai bersama, dan melemahnya rasa kebersamaan, Gejala melemahnya norma sosial dalam suatu masyarakat biasa disebut sebagai gejala "*anomie*". Kemungkinan "*anomie*" terjadi karena melemahnya kontrol sosial akibat kegagalan institusional dari lembaga-lembaga pemerintahan dan/atau organisasi sosial dalam mengelola masyarakat Kota Harmoni tersebut. Selain itu masalah-masalah eksternal, dari masalah krisis ekonomi nasional – pemutusan hubungan kerja (PHK) dan naiknya harga-harga, inflasi – sampai ke bencana alam, bisa menjadi penyebab dari masyarakat yang patologis. Kota Harmoni masyarakatnya (diduga) menjadi patologis kemungkinan karena keterikatan dan kebersamaan di antara warganya melonggar (misalnya akibat polarisasi pilihan politik), lembaga-lembaga sosial dan pemerintahannya yang tidak efektif menyelesaikan berbagai masalah sosial bersamaan dengan melemahnya norma-norma sosial yang berlaku sementara kesenjangan antara kaya dan miskin melebar, kelompok-kelompok warga terasing satu sama lainnya, dan akhirnya terjadi krisis kepercayaan antara sesama warga masyarakat dan antara warga dengan pemerintahannya.

1.b. Sebagaimana dibahas dalam (Ref. [4]), untuk memperbaiki kondisi patologis suatu kota seperti Kota Harmoni, seyogyanya upaya intervensi dari pemerintah atau pendekatan kelembagaan lainnya, baru dilakukan jika komunitas-komunitas dalam masyarakat tersebut telah terbukti gagal menyelesaikan sendiri masalahnya. Penyelesaian masalah yang paling efektif jika dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Kota Harmoni tanpa intervensi luar. Tapi jika masyarakat sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri, barulah diperlukan intervensi pemerintah atau lembaga-lembaga sosial lainnya.

Langkah pertama adalah men-diagnosis kondisi patologis yang ada secara tepat. Mungkin diperlukan profesional - ahli sosiologi perkotaan, misalnya - yang memahami secara mendalam

kondisi patologis suatu masyarakat, serta dampak negatifnya bagi komunitas dalam masyarakat tersebut. Sebagaimana ketika dokter men-diagnosis penyakit seorang pasien, maka yang paling penting adalah memeriksa semua gejala yang tampak, dan mengukurnya sesuai ukuran-ukuran baku suatu parameter. Misalnya, terkait tindak kejahatan yang semakin meningkat, berapa sering terjadi frekuensinya, apakah terduga pelaku kejahatan tersebut warga Kota Harmoni sendiri, atau dari luar. Demikian juga terkait konsumsi obat-obatan terlarang, apakah kalangan warga yang miskin yang melakukannya, atau justru warga yang kaya. Peningkatan kemiskinan juga harus jelas ukurannya, apakah yang dimaksud adalah bertambahnya jumlah warga miskin, atau berkurangnya pendapatan warga, atau dua-duanya. Diagnosis sangat penting dilakukan secara profesional, karena bahaya dari akibat kesalahan diagnosis, misalnya memojokkan seseorang atau sekelompok orang sebagai “biang keladi”, padahal sumber masalahnya adalah masalah struktural.

Setelah dilakukan diagnosis yang akurat, langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan publik kepada kemampuan pemerintah atau lembaga sosial lainnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kepercayaan publik bisa dibangun dengan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional, tidak berlebihan, transparan, akuntabel dan taat azas atau konsisten. Permasalahan tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa rasa percaya warga masyarakat, bukan hanya kepada pemerintahnya sendiri, tapi bahkan rasa percaya kepada tetangganya. Tanpa rasa percaya, yang akan berkembang hanyalah rasa saling curiga satu sama lain.

Langkah selanjutnya setelah terbangun rasa percaya, adalah membangun kebersamaan, sehingga segenap warga masyarakat dapat bersatu-padu dan ber-partisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah. Misalnya saja (ini pernah di-praktek-kan di lingkungan RT kami), dengan mengumpulkan dana sosial untuk membantu warga yang mengalami musibah, misalnya dirawat di rumah-sakit atau wafat. Melalui dana sosial ini akan terjadi “sambung rasa” antara warga yang mampu dan yang tidak mampu, sehingga terbangun kebersamaan. Insya Allah, setelah terbangun rasa kebersamaan, semua masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Contohnya, kejahatan berupa pencurian, bisa diatasi dengan giliran ronda malam, dari warga, atau menggaji penjaga malam. Masalah penyalah-gunaan obat-obatan terlarang memang urusan polisi, tapi warga masyarakat dapat membantu dengan membuat laporan jika melihat sesuatu yang mencurigakan di lingkungannya.

1.c. Rekomendasi kongkrit yang pertama adalah meminta bantuan profesional, misalnya ke lembaga kajian untuk menurunkan tim peneliti sosial yang akan mempelajari dengan seksama kondisi masyarakat Kota Harmoni, apakah memang benar-benar sudah sampai pada tahap “patologis”, dan seberapa parah. Jika itu sulit dilakukan karena berbagai kendala, maka rekomendasi kongkrit yang kedua adalah mengumpulkan beberapa (maksimum 5 orang) tokoh

masyarakat yang dianggap memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial di Kota Harmoni untuk berdiskusi dan bermusyawarah menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka memperbaiki kondisi (yang diduga) “pathologis” tersebut. Mungkin langkah-langkah awal yang diambil belum akan sampai ke akar permasalahan, tetapi setidaknya bisa mengatasi gejala-gejalanya dulu. Ibaratnya seseorang yang sakit, langkah awal adalah mengatasi gejala (*symptom*)-nya, misalnya rasa pusing, batuk-pilek, nyeri, dan sebagainya, baru setelah itu mencari penyakit yang sesungguhnya. Ada tiga gejala yang dilaporkan, yaitu: (1) kejahatan, (2) obat-obatan terlarang dan (3) kemiskinan. Masing-masing dapat dicoba untuk diatasi dengan berbagai cara yang biasa dilakukan untuk gejala tersebut. Misalnya untuk mengatasi kejahatan bisa diberdayakan ronda malam atau sistem keamanan lengkungan, atau menggaji SATPAM khusus, kemudian untuk mengatasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang bisa dilaporkan ke Satuan Narkoba di Polsek setempat, sedangkan untuk masalah pengentasan kemiskinan, bisa digagas berbagai kegiatan bakti sosial. Sekali lagi, ini baru upaya sementara untuk mengatasi gejala yang ada, sedangkan untuk mengatasi kondisi pathologis yang sebenarnya, perlu penanganan lebih lanjut yang lebih mengakar. Harus diingat bahwa gejala-gejala *symptomatic* yang ada mungkin bisa diatasi dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang bisa malah semakin memperburuk kondisi pathologis dari masyarakat Kota Harmoni. Tujuannya bukanlah semata-mata meningkatkan ketaatan warga masyarakat terhadap norma yang berlaku, tapi lebih kepada tercapainya kondisi berkelanjutan dari masyarakat yang stabil, sejahtera dan berkeadilan.

Pertanyaan 2/2:

ALEX

2.a. Bagaimana hubungan antara perilaku Alex dengan parameter perilaku yang menyimpang dari perspektif patologi sosial?

2.b. Apa yang mungkin menjadi faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang Alex berdasarkan konteks cerita ini?

2.c. Bagaimana masyarakat sekitar bereaksi terhadap perilaku Alex, dan bagaimana hal ini mencerminkan pandangan sosial terhadap perilaku yang menyimpang

Jawaban 2/3:

2.a. Dari perspektif patologi sosial, berbeda dengan pandangan psikologis dan psikiatri, perilaku menyimpang individu seperti Alex, tidaklah dilihat sebagai kondisi pribadi yang berdiri sendiri di ruang hampa. Boleh jadi Alex yang dianggap ber-perilaku menyimpang tersebut merupakan gejala atau *symptom* dari tidak berfungsinya (*dysfunction*) pranata-pranata sosial yang lebih besar, atau tidak ter-organisasi-nya (*disorganization*) pelembagaan sosial yang menaungi kehidupan seorang Alex. Dari referensi (Ref. [5], khususnya Lemert (1951)) diketahui bahwa penyimpangan perilaku individu seperti Alex, umumnya merupakan akibat dari kondisi sosial di laur individu itu sendiri,

bukan berasal “dari dalam” seperti karena faktor genetik, atau karena memang ada bakat dan kecenderungan tertentu dari individu tersebut. Kondisi sosial di luar individu yang bisa mengakibatkan perilaku menyimpang sesosok individu, misalnya “*anomie*” sebagaimana dijelaskan dalam jawaban soal 1.a. di atas, berkembangnya perasaan diperlakukan tidak adil atau perasaan didzolimi, lemahnya pengendalian sosial, kesenjangan sosial, kurangnya kebersamaan serta solidaritas antar warga, dan lain-lain.

2.b. Dari konteks cerita Alex, maka penyebab utama dari perilaku Alex yang dianggap “menyimpang” itu adalah karena kurangnya apresiasi atau penghargaan masyarakat – khususnya komunitas di mana Alex berkiprah sebagai seorang seniman – terhadap hasil karya Alex. Kurangnya apresiasi dari masyarakat menumbuhkan pada individu rasa frustrasi, terasing (dalam kasus Alex, bahkan ada perasaan “terbuang dari komunitas”-nya) dan ketidak-berdaya-an, sehingga kehilangan motivasi. Dari (Ref. [5], Becker (1963)), Alex sebagai “orang luar” (*outsider*) kemudian mengasingkan diri dan kehilangan motivasi karena rasa tidak berdaya menghadapi masyarakatnya. Walau pun demikian, sosiologi tidak mengatakan secara deterministik bahwa gejala penyimpangan perilaku itu pasti disebabkan oleh suatu kondisi tertentu saja, melainkan karena berbagai sebab yang berkaitan satu sama lain. Perilaku Alex yang dianggap menyimpang, tentu bukan hanya karena hasil karyanya tidak lagi dihargai oleh komunitasnya, tapi juga karena komunitas-nya tersebut sudah tidak lagi dapat menghargai hasil karya Alex (dan mungkin juga teman-temannya yang lain), hanya saja Alex yang menanggapinya secara negatif berlebihan. Jadi penyebab utama dari perilaku menyimpang yang sepertinya dilakukan Alex, bukanlah akibat dari Alex-nya sendiri, atau akibat dari komunitas-nya yang tidak menghargai, tapi lebih cenderung sebagai akibat **interaksi** yang tidak sehat antara Alex dan komunitasnya.

2.c. Reaksi atau respon masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan individu sama pentingnya dengan perilaku menyimpang itu sendiri. Dalam kasus Alex, mungkin reaksi masyarakat hanya berupa “rasa tidak senang” saja, yang sebagian hanya menyimpannya dalam hati, atau dengan melarang anak-anaknya mendekati Alex. Tentu ada timbul tanda-tanya, mengapa Alex bisa jadi begitu. Tapi setelah memahami kondisi yang dialami Alex, sebagian akan memaklumi saja dan berupaya untuk memahami. Dalam hal ini, selama keberadaan Alex tidak mengganggu atau lebih-lebih membahayakan, maka reaksi masyarakat juga akan “biasa-biasa” saja. Mungkin ada saja di kalangan masyarakat yang berupaya “menyembuhkan” perilaku menyimpang Alex dengan mulai memberikan perhatian, bahkan dilanjutkan dengan penghargaan, pada hasil-hasil karya Alex, atau dengan memberikan motivasi agar Alex kembali berkarya dan kembali ke kehidupannya yang dianggap normal.

REFERENSI

[1] **Anggraeni Primawati dan Harun Sitompul**, “*Sosiologi Perilaku Menyimpang*”, **Modul 1 – 9, SOSI4412**, Edisi 4, [November 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta

[2] Masyarakat Pathologis:

Durkheim, É. (1951). *Suicide: A study in sociology* (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Free Press. (Original work published 1897).

Durkheim, É. (1984). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893).

Spencer, H. (1896). *The principles of sociology* (Vol. 1). D. Appleton and Company. <https://archive.org/details/principlessociol01spen>

[3] Pathologi Sosial:

Lemert, E. M. (1951). *Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior*. McGraw-Hill.

Mills, C. W. (1943). The professional ideology of social pathologists. *American Journal of Sociology*, 49(2), 165–180. <https://doi.org/10.1086/219349>

Rubington, E., & Weinberg, M. S. (Eds.). (2010). *The study of social problems: Seven perspectives* (7th ed.). Oxford University Press.

[4] Intervensi Pemerintah:

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Etzioni, A. (1995). *The spirit of community: Rights, responsibilities, and the communitarian agenda*. Crown Publishers.

Sampson, R. J. (2012). *Great American city: Chicago and the enduring neighborhood effect*. University of Chicago Press.

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). *The spirit level: Why greater equality makes societies stronger*. Bloomsbury Press.

[5] Perilaku Menyimpang dalam Masyarakat:

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott.

Lemert, E. M. (1967). *Human deviance, social problems, and social control*. Prentice-Hall.